

PELAKSANAAN KESESUAIAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR

Endah Rantau Itasari

Universitas Tanjungpura Pontianak
e-mail: {itasari@gmail.com}

Abstrak

Pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan kondisi faktual di kelima kabupaten di kawasan perbatasan. Pola, kecenderungan dan dinamisasi faktual di lapangan merupakan dasar penalaran atau konstruksi hukum untuk menginterpretasikan tingkat kesesuaian pemenuhan kewajiban normatif di tingkat internasional di level nasional. Pola dan kecenderungan adalah rasio pendekatan ilmu sosial dan kesesuaian adalah justifikasi yuridis dalam kerangka penalaran hukum. Relasi dalam penalaran hukum ini terletak pada analisis munculnya gap atau ketimpangan antara apa yang terjadi di lapangan dengan ketentuan normatif sehingga dinamisasi hukum merupakan cerminan konsistensi dan afirmasi terhadap pengimbangan antara yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Konteks dan perspektif Provinsi Kalimantan Barat dan di kawasan perbatasan negara merupakan ciri atau pendekatan partikularisme dalam analisis pemenuhan dan perlindungan HAM yang berbasis pada nilai-nilai universal berbasis pada kesamaan, kemerdekaan dan kebebasan. Dengan demikian, eksistensi tersebut membuktikan komitmen dan kepatuhan negara pada standar internasional utamanya pada pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah.

Kata kunci: Pemenuhan hak atas Pendidikan, Kawasan perbatasan, ICESCR

Abstract

Implementation of basic and secondary education in West Kalimantan Province in general and factual conditions in the five districts in the border area. Patterns, trends and factual dynamics in the field are the basis for reasoning or legal construction to interpret the level of conformity in fulfilling normative obligations at the international level at the national level. Patterns and tendencies are the ratios of social science approaches and suitability is a juridical justification within the framework of legal reasoning. This relation in legal reasoning lies in the analysis of the emergence of gaps or inequality between what is happening in the field and normative provisions so that the dynamics of law is a reflection of consistency and affirmation of the balance between what is happening and what should have happened. The context and perspective of the Province of West Kalimantan and in the national border area is a characteristic or a particularism approach in the analysis of the fulfillment and protection of human rights based on universal values based on equality, independence and freedom. Thus, this existence proves the state's commitment and compliance with international standards, especially in the fulfillment of the right to primary and secondary education.

Keywords: *Fulfillment of educational rights, Border areas, ICESCR*

PENDAHULUAN

Pendidikan Dasar dan Menengah di Kawasan Perbatasan

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai luas wilayah sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Wilayah Provinsi ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Ciri-ciri spesifik lainnya adalah wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu propivsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 966 kilometer memisahkan wilayah Indonesia dengan wilayah Sarawak, Malaysia.

Garis batas tersebut melintasi lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Kelima Kabupaten tersebut membentuk wilayah yang disebut sebagai kawasan perbatasan dalam Disertasi ini. Secara administratif kelima Kabupaten tersebut terbagi lagi menjadi 15 kecamatan, 176 desa, 478 dusun yang terdapat di wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Dengan luas wilayah 26.280,24 kilometer persegi, wilayah perbatasan tersebut memiliki jumlah penduduk sebesar 225.771 jiwa. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah paling luas dengan jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan empat Kabupaten yang lainnya.

Di Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Empanang yang keduanya terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, tidak ada satupun SMA/ sederajat. Artinya anak-anak di kedua kecamatan

ini yang ingin bersekolah pada tingkat pendidikan menengah atas harus bersekolah di kecamatan terdekat lain yang memiliki SMA, yaitu dalam hal ini adalah Kecamatan Badau. Padahal jarak antara kecamatan-kecamatan tersebut relatif jauh. Sebagai contoh, antara pusat Kecamatan Puring Kencana dengan pusat Kecamatan Badau berjarak sekitar 55 km dengan sebagian besar didominasi oleh jalan dengan kondisi rusak.

Karena jarak yang relatif jauh, beberapa anak-anak dari kedua kecamatan tersebut, bahkan anak-anak yang berasal dari Kecamatan Badau sendiri kemudian memutuskan untuk bersekolah di Sarawak, Malaysia. Selain karena fasilitas yang lebih layak, tamatan dari sekolah setara SMA yang ada di Sarawak mendapatkan sertifikat life skill dan dapat bekerja di Malaysia dengan gaji yang lumayan. Namun fenomena seperti ini tidak ditemui di Kecamatan Entikong maupun di Kecamatan Sajingan Besar. Fenomena tersebut menguatkan ciri wilayah tak berkeinginan sekolah karena ketimpangan sarana di negara lain yang berbatasan langsung. Di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar anak-anak dari daerah ini tidak diperbolehkan untuk bersekolah di wilayah Biawak, Sarawak meskipun antara masyarakat di Desa Sebungan dengan masyarakat di Kampung Biawak umumnya terikat pada garis kekerabatan. Meskipun salah satu dari orang tua anak tersebut berkewarganegaraan Malaysia, namun tetap ada kesulitan bagi anaknya untuk dapat menikmati fasilitas pendidikan di sisi wilayah Sarawak, Malaysia.

Di Kecamatan Sajingan Besar, luas wilayah sebesar 1.391,20 km²

dengan kepadatan penduduk rata-rata 8 penduduk per km² membuat jarak antar permukiman menjadi relatif sangat jauh. Kendala ini juga membuat lokasi dari beberapa permukiman penduduk ke sekolah-sekolah yang ada juga menjadi jauh dan kurang terjangkau oleh anak-anak didik di sekolah dasar dan menengah. Kondisi geografis Kecamatan Sajingan Besar yang berbukit-bukit juga membuat akses menjadi sangat sulit dari satu tempat ke tempat lainnya. Walaupun jalan nasional yang menuju PLBN Aruk kondisinya cukup baik, namun beberapa akses ke dusun-dusun tertentu masih lumayan sulit untuk dilalui. Beberapa sekolah dasar dan menengah terletak di jalan nasional adalah SD Negeri 4 dan SMP Negeri 1 di Desa Kaliau.

Di Kecamatan Entikong, jarak yang jauh menuju ke sekolah juga dialami, terutama oleh siswa-siswa SMP karena rasio jumlah SD ke SMP begitu timpang jumlah sekolahnya. Jumlah SMP/ sederajat yang hanya lima dan umumnya terletak di dekat pusat kecamatan seperti SMP Negeri 3 Entikong, ataupun di pinggir jalan nasional seperti SMP Negeri 1 Entikong. Keadaan ini menyebabkan siswa-siswa yang berasal dari desa-desa terjauh kesulitan dalam mengakses pendidikan di tingkat menengah pertama. Kesulitan kedua muncul bagi orang tua anak-anak didik di SMP. Orang tua harus mengeluarkan biaya pendidikan yang sangat tinggi karena mereka harus membayar kost atau penginapan bagi anak-anak mereka yang sekolah di pusat kota Kecamatan Entikong.

Di SMP Negeri 3 Entikong, 90% siswa merupakan anak-anak dari petani yang berada di wilayah pedalaman dari

Kecamatan Entikong. Banyak dari siswa sekolah harus berjalan, naik sepeda atau naik angkutan umum dengan menempuh jarak 7-10 km dari rumahnya untuk sampai ke sekolah. Jarak yang sama harus ditempuh ketika mereka kembali dari sekolah. SMP Negeri 3 Entikong sendiri terletak di Desa Entikong yang meruoakan pusat kota Kecamatan Entikong. SMP 3 Entikong juga berada di tepi jalan negara yang menuju PLBN Entikong. Kondisi jalan relatif baik, namun jalan-jalan yang menuju desa-desa dimana siswa-siswa tersebut berasal kebanyakan kondisinya jelek. Banyak siswa mengendarai sepeda motor ataupun sepeda memilih untuk membawa kendaraannya ketika pergi dan pulang dari sekolah. Sebagian dari siswa lainnya memilih untuk tinggal di dekat lokasi sekolah dengan menyewa atau tinggal secara suka rela dengan warga.

Siswa-siswa seperti ini biasanya tinggal di tempat-tempat kos, asrama yang dimiliki Gereja, ataupun menumpang dengan keluarga ataupun warga lain yang berdomisili dekat dengan sekolah.²³⁹ Siswa-siswa yang tinggal di tempat kos maupun asrama harus mengeluarkan biaya untuk akomodasinya tersebut. Sementara itu, siswa-siswa yang menumpang di rumah keluarga atau warga lainnya harus membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan tersebut sangat bervariasi di tempatnya menumpang seperti yang biasa dilakukan oleh Asisten Rumah Tangga.²⁴⁰ Dengan demikian, konsentrasi anak didik terkadang terganggu dengan beban lain selain belajar karena harus membantu

mengerjakan pekerjaan rumah dari orang tua asuhnya sehari-hari.

Tidak semua gedung sekolah yang terdapat di wilayah perbatasan berada dalam kondisi layak. Di Desa Lubuk Sauk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau terdapat SDN 28 yang hanya memiliki 3 lokal ruang yang dipergunakan oleh 6 kelas (rombongan belajar). Untuk mengakomodir proses pembelajaran bagi 6 kelas tersebut, ketiga lokal ruang yang ada digunakan untuk dua kelas sekaligus dengan masing-masing lokal ruang dibagi menjadi dua dengan pemisah dari kayu dan kayu lapis (triplek). Kondisi tersebut tentu saja membuat proses pembelajaran berjalan dengan tidak optimal dan menghambat pencapaian tujuan dasar pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan dan kebenaran akademik terhadap pemenuhan kewajiban internasional HAM yang diterima Indonesia, khususnya di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan ICESCR. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap pemenuhan hak pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan bahan hukum sekunder menentukan jenis normatif empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data primer serta studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.²⁸ Sebagai penelitian hukum normatif empiris, maka pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan terhadap responden pemangku kepentingan di kelima kabupaten di kawasan perbatasan yaitu: (1). guru dan kepala sekolah di Kecamatan Entikong dan Aruk; dan (2). LSM pendidikan di Kecamatan Entikong dan Aruk yaitu Dompot Dhuafa dan Wahana Visi Indonesia (WVI) di Sambas. Wawancara terstruktur juga telah dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Deputi 5 Kantor Staf Presiden bidang Perbatasan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas dalam kurun waktu Desember 2017 sampai dengan Februari 2018.

Analisis data adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam Disertasi ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh yaitu kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melakukan analisis secara

kualitatif ini, peneliti melakukan analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu: (1). Mengumpulkan data dengan dikelompokkan sesuai dengan obyek atau variabel dalam penelitian; (2). Memilah dan mengolah data mengenai hukum, kebijakan, program, kegiatan serta pendanaan pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan; (3). Mengevaluasi data dengan kuantifikasi dan preskripsi sesuai dengan relevansinya, (4). Menetapkan kesimpulan dan rekomendasi jika diperlukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan ketersediaan ruang kelas dan jumlah sekolah sering ditemukan di kawasan perbatasan. Di Kecamatan Entikong, sejak tahun 2007, tidak ada penambahan jumlah sekolah maupun ruang kelas baru. Sementara itu, secara nyata di Kecamatan ini masih membutuhkan penambahan jumlah sekolah maupun ruang kelas, khususnya bagi pendidikan menengah pertama dan atas.

Pada tingkat pendidikan menengah pertama, SMP yang berjumlah lima sekolah dirasakan tidak mencukupi untuk menampung lulusan SD. Keinginan masyarakat Entikong untuk menambah jumlah SMP/ sederajat secara kebetulan mendapatkan saluran dengan kehadiran lembaga nirlaba "Dompot Dhuafa". Bersama dengan masyarakat, khususnya di Desa Entikong yang merupakan pusat Kecamatan Entikong, lembaga "Dompot Dhuafa" sedang merintis pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Pada tingkat pendidikan menengah atas, meskipun terdapat dua

SMK (SMK Negeri 1 Entikong dan SMK Yayasan Lintas Batas/YLB) namun ketiadaan SMA di kecamatan ini menyebabkan hambatan bagi lulusan SMP yang ingin meneruskan pendidikannya ke SMA. Penyediaan SMA, khususnya SMA Negeri di Kecamatan Entikong terbentur pada adanya aturan yang mengharuskan ketersediaan lahan seluas kurang lebih 2 hektar yang harus disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten belum menyiapkannya di wilayah Kecamatan Entikong.

Di Kecamatan Sajingan Besar, meskipun terdapat satu SMK namun ketiadaan SMA dirasakan sebagai hal yang menghambat bagi pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya pendidikan menengah. Anak-anak dari beberapa desa di Kecamatan Sajingan Besar yang ingin meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah atas harus keluar dari Sajingan Besar untuk dapat bersekolah di SMA. Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk bersekolah SMA di Sambas sebagai pusat kabupaten karena fasilitas yang dirasakan lebih memadai. Untuk itu, mereka juga harus menumpang di rumah keluarga atau rumah orang ataupun kos.244 Kebutuhan akan adanya SMA di Kecamatan Sajingan Besar sedang direspon dengan tengah dibangunnya sebuah SMA di pusat Kecamatan Sajingan Besar, yaitu Desa Kaliau.

Beberapa rehabilitasi dilakukan terhadap gedung sekolah dan ruang kelas, dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah. Pendanaan dari non-pemerintah misalnya adalah program Corporate Social Responsibility (CSR)

dari Bank Rakyat Indonesia yang berupa bantuan rehabilitasi gedung sekolah di SMP Negeri 3 Entikong beberapa tahun yang lalu. 245 Rehabilitasi yang dilakukan mencakup pemasangan lantai keramik, penggantian dinding kayu dengan tembok semen, perbaikan atap dan plafon. Tidak selalu program rehabilitasi maupun penambahan fasilitas sekolah dirasakan tepat sasaran.

Di SD Negeri 1 Desa Semanget Kecamatan Entikong, karena letak sekolah yang rendah menyebabkan pada waktu hujan halaman sekolah menjadi tergenang dan becek. Kondisi ini menyebabkan terganggunya aktivitas seperti kegiatan upacara, pelajaran olahraga maupun para siswa yang bermain pada saat menjelang masuk ataupun pada jam istirahat. Pada tahun 2017 sebagian halaman SD Negeri 1 Semanget disemen, namun penyemenan dilakukan pada bagian halaman yang tidak menjadi titik sentral dari bangunan sekolah. Akibatnya kegiatan upacara bendera yang dilakukan tetap mengalami kesulitan jika halaman sekolah tergenang air hujan dan becek.

Membandingkan antara kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki antara gedung sekolah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia (Kalimantan Barat) dengan gedung sekolah yang berada di wilayah perbatasan Malaysia (Sarawak) menjadi hal yang menarik untuk memperlihatkan aspek kualitas dari pemenuhan hak atas pendidikan. Salah satu contoh perbandingan adalah SD Negeri 4 yang terletak di Dusun Tapang, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar dengan Sekolah Kebangsaan (SK) Biawak yang terletak di Kampong Biawak, Distrik

Lundu, Sarawak yang berjarak kurang lebih 700 meter dari perbatasan. Bila SD Negeri 4 Kecamatan Sajingan Besar merupakan bangunan semi permanen satu lantai dengan fasilitas sekedarnya, maka SK Biawak merupakan bangunan dua lantai dengan fasilitas yang terbilang cukup lengkap, termasuk lapangan yang luas. SK Biawak juga memiliki fasilitas kendaraan antar jemput (Bas Sekolah) bagi murid-murid yang berdomisili di desa-desa (kampong-kampong) yang letaknya cukup jauh dari sekolah.

Keterbatasan fasilitas juga dihadapi oleh para guru dan siswa di wilayah perbatasan terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Jaringan internet yang tidak selalu lancar bahkan ketiadaan jaringan internet di desa-desa tertentu dan juga minimnya jumlah computer menyebabkan kesulitan bagi beberapa sekolah di wilayah perbatasan seperti di Kecamatan Entikong dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Ditinjau dari segi aspek akses terhadap hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, kualitas akses dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap tingkat atau jenjang pendidikan. APK adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu, sedangkan APM adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Selanjutnya untuk memperjelas apa yang dimaksud sebagai kelompok usia jenjang

pendidikan tertentu, dapat dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu: (1). Usia 7-12 tahun merupakan kelompok usia pendidikan dasar; (2). Usia 13-15 tahun merupakan kelompok usia pendidikan menengah pertama; dan (3). Usia 16-18 tahun merupakan kelompok usia pendidikan menengah atas.

Dapat dilihat bahwa jumlah siswa pada tingkat SD dan juga SMP di beberapa kabupaten perbatasan tidak berada dalam rentang usia tertentu, yakni 7-12 tahun untuk SD dan 13-15 tahun untuk SMP. Kecenderungan ini berarti pada tiap tingkat pendidikan tersebut terdapat siswa yang kurang dari atau lebih dari rentang usia tersebut. Kenyataan ini mejadi deviasi dalam jenjang pemenuhan pendidikan dasar dan menengah nasional Indonesia yang telah di tetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di Kecamatan Entikong animo yang tinggi dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya menyebabkan setiap tahunnya jumlah pendaftar untuk SD jumlahnya melebihi kapasitas daya tampung. Kondisi ini lebih nyata lagi di SD/ sederajat yang lokasinya berada di Desa Entikong sebagai pusat aktivitas di Kecamatan Entikong sekaligus lokasi dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Persoalan lain yang sering dihadapi dalam pemenuhan atas hak pendidikan, khususnya dasar dan menengah di wilayah perbatasan adalah kurangnya jumlah guru atau tenaga pengajar. Meskipun dari data statistik memperlihatkan bahwa rasio murid terhadap guru masih dalam kondisi yang ideal seperti diperlihatkan dalam tabel-tabel di bawah ini, namun nyatanya beberapa sekolah di perbatasan mengalami kekurangan

guru. Bahkan di beberapa sekolah pertumbuhan jumlah guru minus karena tidak berimbangnya jumlah guru yang diangkat dengan jumlah guru yang pensiun ataupun pindah ke tempat lain.

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, rasio ideal murid berbanding guru pada tingkat SMP adalah 20:1, sedangkan untuk MTs adalah sebesar 15:1. Rasio jumlah guru berbanding murid pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 8 berkisar dari 8,60:1 yaitu di Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu hingga 30,97:1 di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan rata-rata sebesar 17,23:1. Walaupun secara rata-rata rasio pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat masih berada pada standar ideal, namun data menunjukkan bahwa di beberapa kecamatan tingginya jumlah murid kurang dibarengi dengan jumlah guru sehingga di beberapa kecamatan rasio antara murid dengan guru menjadi sangat tidak berimbang.

Persoalan kekurangan jumlah guru juga dihadapi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar. Di desa ini terdapat 4 SD dengan guru berjumlah 36 orang yang mengajar 584 siswa dan 1 SMP dengan guru berjumlah 6 orang yang mengajar 122 siswa. Ironisnya anak-anak dari Kecamatan Sajingan Besar, khususnya dari Desa Sebunga yang mempunyai kesempatan untuk kuliah di beberapa perguruan tinggi, baik di Pontianak, di Sambas ataupun di tempat lainnya memilih kuliah di jurusan atau program studi yang berkaitan dengan pendidikan keguruan, namun selepas kuliah mereka tidak

berkeinginan untuk menjadi guru di tempat asalnya.

Untuk menutupi kekurangan jumlah guru, beberapa sekolah melakukan pengangkatan guru honor atau non PNS. Besaran jumlah guru honor yang diangkat masing-masing sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Di SMPN 3 Entikong, jumlah guru honor bahkan melebihi jumlah guru tetap, yaitu 8 orang guru honor dan 5 orang guru tetap. Di MIS Istiqomah, terdapat 4 orang guru PNS yang diperbantukan dan 7 orang guru honor.

PENUTUP

Simpulan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi persoalan bagi pemenuhan hak katas pendidikan di wilayah perbatasan. Banyak guru-guru, baik guru PNS maupun guru honor/non PNS, yang belum memenuhi kualifikasi sebagai pendidik. Salah satu ukuran dari kualifikasi dari guru adalah tingkat pendidikan yang minimal adalah sarjana (S-1). Di Kecamatan Entikong, lebih dari setengah guru-guru baik guru PNS maupun guru honor belum berkualifikasi sarjana. Peningkatan kualitas bagi para guru ini terhambat karena beberapa alasan.

1. Terbatasnya peluang kuliah karena ketiadaan perguruan tinggi yang dekat dengan Kecamatan Entikong ataupun di Kabupaten Sanggau. Guru-guru yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya harus mengikuti kuliah di perguruan perguruan tinggi yang letaknya cukup jauh, misalnya di Sintang atau malah di Pontianak. Beberapa waktu terakhir

memang dibuka semacam cabang dari STKIP Melawi. STKIP Melawi sendiri merupakan perguruan tinggi swasta yang pengelolaannya berada di pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dan khusus di Entikong STKIP Melawi membuka Kampus Wilayah Perbatasan yang disiapkan untuk kelak menjadi STKIP mandiri. Saat ini STKIP Melawi Kampus Wilayah Perbatasan Entikong memiliki dua program studi, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Meskipun demikian, tidak semua guru-guru dengan leluasa kemudian dapat memanfaatkan kehadiran STKIP Melawi Kampus Wilayah Perbatasan Entikong ini karena alasan berikutnya;

2. Kurangnya dana dan bantuan pemerintah daerah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa guru-guru, khususnya guru honor mendapatkan penghasilan yang sangat minim. Honor yang mereka dapatkan dari sekolah seringkali berada di bawah UMP dan UMK. Banyak dari guru-guru honor tersebut yang harus mengerjakan pekerjaan lain di samping mengajar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Artinya sangat sulit bagi mereka untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang didapatkannya untuk biaya kuliah. Meskipun relatif memperoleh penghasilan yang lebih baik, beberapa guru PNS juga mengatakan bahwa mereka belum dapat meningkatkan

kualifikasi pendidikannya dengan mengikuti pendidikan tinggi karena alasan kurangnya kemampuan ekonomi. Di pihak lain, para guru tersebut kurang mendapat dukungan dari pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten, yaitu tidak adanya bantuan dana bagi para guru yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana.

Saran

Dari gambaran kondisi pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia terlihat masih ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad H Azhari, Peranan DPRD dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, Makalah disampaikan dalam Temu Konsultasi Diseminasi RAN HAM Bidang Pendidikan, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, di Medan tanggal 22-25 Oktober 2002

Amnesty International, 2014, Human Rights for Human Dignity, AI Publications, Second Edition

Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang

Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.

Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.

Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi

- Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah

- Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Fuad Al-Darawesh and Dale T Sinuwert, 2015, Human Rights Education Beyond Universalism and Relativism, A Relational Hermeneutics for Global Justice, Palgrave McMillan
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket

- Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Hillary Rodham, 1973, "Children Under the Law", 43 Harvard Educational Review
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Kathleen Funder, 1996, "Children's Rights: Setting the Scene", dalam Kathleen Funder (ed), *Citizen Child: Australian Law and Children's Rights*,
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Malik, F., Abduladjud, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People

- with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Manfred Nowak, 1995, "The Right to Education" dalam Asbjorn Eide
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2)
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liaison Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis. *Juris. Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan*

- Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi

- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).

- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan

- Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Susan Roberta Katz and Andra Mceaov Spero, 2015, *Bringing Education to Classroom*, Palgrave McMillan
- The Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, part II, para 79
- UNESCO & The World Bank, 2004, "Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization, Indonesia Education Sector Review", Volume 2,
- UNICEF, 1998, *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children*

- and Women: What It is, And Some Changes It Will Bring, 17 April 1998 dan bandingkan dengan The World Conference on Human Rights: Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, Part I, para 5
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 55-65.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 155-163.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua

- Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.